

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGELOLAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL (BPJS) KESEHATAN PEKANBARU DARI
PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI



Oleh :

**AINUN AMELYA
NIM. 11522201406**

**PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2019 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGELOLAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL (BPJS) KESEHATAN PEKANBARU DARI
PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**AINUN AMELYA
NIM. 11522201406**

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1441 H/2019 M

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul PENGELOLAAN BADAN PENYELENGGARAAN
JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN PEKANBARU DARI PRESPEKIF
FIQH MUAMALAH

Yang ditulis :

Nama : Ainun Amelya

Nim : 11522201406

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Oktober 2019

Pembimbing Skripsi


Drs. Zainal Arifin, MA

NIP: 196507041994021001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pekanbaru Dari Perspektif Fiqh Muamalah*, yang ditulis oleh :

Nama : **Ainun Amelya**
NIM : 11522201406
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 21 Oktober 2019
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Oktober 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. H. Zainal Arifin, MA

Sekretaris
Basir, SHL, MH

Penguji I
H. Rahman Alwi, MA

Penguji II
Hendri Sayuti M.Ag

.....
.....
.....
.....

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

AMELYA (2019) : Pengelolaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pekanbaru.

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan Pekanbaru dibentuk sebagai salah satu tanggungjawab negara terhadap rakyatnya atas kesehatan. Penyelenggaraan jaminan sosial merupakan salah satu tanggungjawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakatnya sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan, yang dilatarbelakangi adanya kejanggalan pada mekanisme pengelolaan BPJS Kesehatan dimana adanya perbedaan besaran iuran dan pengalokasiannya sehingga menimbulkan keinginan penulis untuk mengetahui lebih dalam tentang pengelolaan BPJS kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan BPJS Kesehatan Pekanbaru dan bagaimana Prespektif Fiqh Muamalah terhadap Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kota Pekanbaru, yang menjadi subjek penelitian ini adalah pihak BPJS Kesehatan dan peserta BPJS Kesehatan Pekanbaru dan obek penelitian ini adalah pengelolaan yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan.

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai BPJS kesehatan sebanyak 54 orang dan masyarakat Pekanbaru yang terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan. Sedangkan yang menjadi sample pada penelitian ini 12 orang pihak BPJS Kesehatan dan 15 orang peserta BPJS Kesehatan, dengan teknik purposive sampling, yaitu dengan menyesuaikan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan wawancara dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan datanya, sedangkan untuk pengolahan data digunakan metode deskriptif kualitatif.

Kemudian hasil penelitian ini adalah dalam prakteknya pengelolaan BPJS Kesehatan menjadikan sistem gotong royong, manfaat dan keadilan sebagai pedomannya, dimana seluruh peserta dikenakan iuran yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta, kecuali untuk peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang iurannya ditanggung oleh pemerintah, namun dalam BPJS ada beberapa unsur yang tidak sesuai dengan Fiqh Muamalah yaitu adanya *Gambling*, *Gharar*, dan *Riba*, namun ketika dilihat dari aspek *maqahsid syariah* kontemporer yang lebih mengedepankan kemaslahatan sosial dibandingkan kemaslahatan individu maka menjadi anggota BPJS adalah boleh dengan pertimbangan darurat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rasa syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kehadiran Allah SWT telah memberikan kenikmatan hidayah dan kemudahan serta melimpahkan karunianya kepada kita semua sehingga penulis dapat mencurahkan segala jiwa raga dan kemampuan yang dimiliki untuk menggerakkan tangan dan fikiran dalam menyusun kata demi kata menjadi sebuah karya ilmiah ini. Sholawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW atas semangat serta kasih sayang serta keteguhannya untuk membimbing umatnya tanpa pamrih demi keutuhan dan kejayaan umatnya dalam keIslaman.

Didalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya telah banyak mengalami kesulitan, hambatan dan tantangan. Namun berkat bantuan, dorongan dan arahan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan akademik pada program strata satu (S1), pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Ayahanda dan ibunda tercinta yang kasih sayang serta pengorbanan dan doanya yang tidak dapat penulis balas, yang telah banyak memberikan bantuan moril maupun materil sehingga penulis sampai ketahap ini, dan mampu menyelesaikan peneitian ini.
2. Adik-adik penulis (Ahmad Aldiwansah, Nurul Nadia, Nur Hamisah, Muhammad Ferdiansyah, Rara Abelia dan Riri Abelia) yang telah

memberikan keceriaan, semangat serta dukungan yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ita Purnama sari, Indah Khairunnisa, Sawiyah Hikmah serta Sri Nadia selaku sahabat sekaligus keluarga kedua bagi penulis yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CI sebagai wakil dekan I, bapak Dr. Wahidin, M.Ag sebagai wakil dekan II, bapak Dr. Maghfirah, M. A sebagai wakil dekan III UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Bapak Drs. Zainal Arifin, M.A selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus pembimbing skripsi penulis, dan ibu Dra. Nurlaili, M.Si sebagai sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

7. Bapak Dr. Wahidin M,Ag selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan di bangku kuliah.

8. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup di masa yang akan datang.

9. Pimpinan dan staf perpustakaan UIN SUSKA RIAU yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

0. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah B angkatan 2015 yang telah memotivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 1. Teman-teman KKN yang turut andil dalam proses penyelesaian skripsi ini.
 2. Serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.
- Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga skripsi ini menjadi amal soleh sehingga dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi khazanah ilmu masyarakat luas pada umumnya.
- Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*
- Pekanbaru, Oktober 2019
Penulis
- Ainun Amelya**
NIM: 11522201406
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	16
A. Kota Pekanbaru	16
B. Kantor BPJS Kesehatan Pekanbaru	20
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Pengelolaan BPJS Kesehatan	25
B. Asuransi (<i>Takaful</i>)	33
C. Gharar (Ketidakpastian)	47
D. Mekanisme Pengelolaan Dana	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Mekanisme Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Pekanbaru	49
B. Presfektif Fiqh Muamalah Terhadap Pengelolaan BPJS Kesehatan	59
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Tidak seorangpun yang dapat memprediksikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang secara sempurna, meskipun dengan menggunakan berbagai alat analisis. Setiap prediksi yang dilakukan tidak akan terlepas dari kesalahan perhitungan yang telah dilakukan. Penyebab melesetnya hasil prediksi karena di masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Bahkan untuk hal-hal tertentu sama sekali tidak dapat diperhitungkan seperti maut dan rezeki. Jadi wajar jika terjadinya sesuatu di masa yang akan datang hanya dapat direka-reka sementara.

Setiap orang tidak dapat terhindar dari apa yang disebut resiko. Setiap orang pasti akan mengalami sakit, walaupun tidak mengetahui kapan sakit itu akan datang. Setiap orang pasti akan meninggal dunia walaupun tidak mengetahui kapan waktu dan tempatnya. Untuk mengurangi beban yang ditimbulkan resiko tersebut, pemerintah menganggap perlu menyusun sistem dan Program Jaminan Sosial.

Program itu di maksud sebagai perlindungan bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dari tekanan ekonomi atau hilangnya penghasilan karena pengangguran, sakit, kecelakaan, cacat, hari tua, atau meninggal dunia. Program jaminan sosial dilakukan dalam bentuk bantuan sosial atau melalui asuransi.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©Hak cipta milik UIN Suska Riau
Site Name: UIN Suska Riau
Site ID: 123456789
Site URL: http://www.uin-suska-riau.ac.id

Bantuan sosial dapat diberikan pemerintah kepada masyarakat atau dari pengusaha kepada karyawan dengan cuma-cuma atau dengan subsidi seperti pemeriksaan dokter, pengobatan, perawatan rumah sakit dan lain-lain. Banyak negara merasa tidak mampu memberikan bantuan sosial untuk semua jenis resiko dan banyak negara membatasi bantuan hanya untuk kejadian tertentu seperti bencana alam, wabah penyakit, wabah kelaparan dan sejenisnya.

Penyelenggaraan Jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial-ekonomi kepada masyarakat sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara.¹ Hak tingkat hidup masyarakat yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan merupakan hak asasi manusia dan diakui oleh segenap bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia.

Hampir tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak memprogramkan kemakmuran dalam bidang ekonomi bagi warga negaranya. Semua politisi menjadikan pemberantasan kemiskinan sebagai isu sentral, baik ketika masa kampanye maupun sesudah menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan.

Adanya Undang-Undang merupakan kebutuhan hajat manusia. Karena dengan adanya Undang-Undang masyarakat dapat diatur, kezaliman dapat dicegah, hak-hak manusia dapat dijamin, keadilan dapat terlaksana. Dan dengan Undang-Undang inilah suatu bangsa dapat diarahkan. Fungsi umum daripada Undang-Undang ialah melayani masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Sebagai asas berlakunya dalam arti materil undang-undang

¹ Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, (Depok: Rajawali Pres, 2017), h. 251



merupakan sarana semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu.²

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan optimal.³ Peran pemerintah lebih dititik beratkan pada pembinaan, pengaturan, dan pengawasan untuk terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi yang serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Kewajiban untuk melakukan pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, tetapi menjadi tanggung jawab pemerintah.

Bila dilihat dari produk hukum asuransi sosial yang pernah diterbitkan di Indonesia, bila diketahui bahwa program asuransi sosial pertama kali yang dikenal secara modern adalah asuransi sosial kecelakaan penumpang dan saat ini lebih dikenal dengan sebutan Jasa Raharja. Kemudian, disusul dengan lahirnya program Asuransi Sosial Tenaga Kerja yang mencakup di dalamnya adalah Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (ASPNS)/ TASPEN, dan Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan (ASKES).⁴

Berkaitan dengan Asuransi Sosial, pemerintah sudah menerbitkan 2 produk hukum setingkat undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia

² Gemalla Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Peransuransian di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2004),h. 145

³ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), h. 1192

⁴ Mulhadi, *Op. Cit*, h. 251

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, yang mulai berlaku diundangkan pada 19 oktober 2004. Kemudian, beberapa tahun berikutnya disusul dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang mulai berlaku dan diundangkan pada 25 November 2011.

Dalam prakteknya di Indonesia jaminan sosial berupa penanggulangan kesehatan bagi masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal ini di atur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011, dimana Undang-Undang No.24 tahun 2011 juga menetapkan Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan BPJS ini terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus Jaminan Kesehatan Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya dimulai pada bulan Januari 2014.

Karena dibentuk berdasarkan undang-undang, menyebabkan asuransi sosial atau jaminan sosial bersifat wajib, dan mengikat semua pihak-pihak yang disebutkan di dalam undang-undang untuk ikut atau menyelenggarakannya, seperti penyedia lapangan kerja/buruh dan atau mengikat seluruh anggota masyarakat agar turut ambil bagian di dalam program jaminan sosial.⁵ Dengan konsekuensi, akan mendapatkan sanksi atau anggota masyarakat yang bersangkutan nantinya tidak akan mendapatkan perlindungan sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

⁵ Mulhadi, *Op. Cit*, h. 153

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pelaksanaan BPJS adalah dengan menanggung jaminan kesehatan ataupun tenaga kerja bagi setiap masyarakat diwajibkan untuk membayar sejumlah iuran dengan nominal tertentu. Metode pelaksanaan BPJS dilihat sekilas seperti pelaksanaan Asuransi pada umumnya. Yang membedakannya adalah BPJS merupakan suatu program pemerintah yang bertujuan untuk menjamin hak masyarakatnya di bidang kesehatan.

Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan makhluk hidup, Islam mengajarkan kita untuk bersikap hati-hati dan mempersiapkan hari esok sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surah Al-Hasyr :18.⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam Islam, kesejahteraan rakyat merupakan suatu tanggung jawab bagi negaranya, dan negaranya diwajibkan untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya dengan cara-cara yang diperbolehkan syariat Islam. Salah satu bentuk jaminan yang dibolehkan dalam Islam adalah dengan akad *tabarru* atau *tolong menolong* yang banyak di gunakan dalam praktek-praktek *takafful* atau asuransi syariah.

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro), h. 545



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hal ini membantu merupakan sebuah keharusan dalam Islam, sebagaimana di jelaskan dalam hadis berikut ini:⁷

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ إِذَا ارَادَ أَنْ يَغْزُو، قَالَ: يَامَعْشَرَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ إِنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْمًا لَيْسَ لَحْمٌ مَالٌ وَلَا عَشِيرَةٌ فَلْيَضْمَ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فَمَا لِأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ يَحْمِلُهُ إِلَّا عُقْبَةً أَحَدِهِمْ قُلْ: فَضَمَمْتُ إِلَيَّ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً وَمَا لِي إِلَّا عُقْبَةُ أَحَدٍ هُمْ مِنْ جَمَلِي، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

Dari jabir ra. Dari Rasulullah saw., bahwasanya bila beliau hendak berangkat perang beliau bersabda: “wahai sekalian sahabat muhajirin dan Anshar sesungguhnya ada sebagian orang diantara saudara-saudaramu yang tidak mempunyai harta dan keluarga, oleh karena itu, hendaklah salah seorang diantara kamu sekalian menggabungkan dua atau tiga orang dengannya”.kemudian tidak ada seorang diantara kami melainkan ia bergantian kendaraan dengan orang ang digabungkannya. Jabir berkata : “ saya menggabungkan dua atau tiga orang dengan saya, dan kesempatan untuk naik ontaku, saya bagi rata antara saya dengan mereka”. (Riwayat Abu Dawud)

Sebagai salah satu bentuk instrumen keuangan Islam, status hukum asuransi masih menjadi perdebatan dikalangan ulama. Ada beberapa ulama yang mengharamkan dan ada yang menghalalkan asuransi. Faktor-faktor yang memberatkan atau jatuhnya hukum haram adalah karena adanya unsur *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidak jelasan) dan *riba* (bunga) dalam asuransi konvensional.

Dalam prakteknya BPJS kesehatan merupakan suatu bentuk asuransi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan tujuan memberikan manfaat untuk

⁷ Muslich Shabir, *Riyadhus Shalihin : terjemah 2*, (Semarang: Karya Toha Putra), h. 45



masa depan rakyat. Asuransi sosial ini merupakan asuransi yang bersifat untung-untungan (*Aleatory*), maksud dari untung-untungan disini adalah persetujuan asuransi dilakukan atas dasar pasal 1774 KUHS sebagai persetujuan untung-untungan, yang mana untung ruginya bagi semua pihak bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.⁸

Perbedaan mengenai sistem jaminan sosial dalam Islam dan sistem jaminan dalam perundang-undangan, baik itu tata cara maupun mekanismenya terutama mengenai iuran. Pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS menyebutkan bahwa setiap peserta BPJS diwajibkan untuk membayar iuran. Maksudnya setiap rakyat atau yang terdaftar sebagai peserta jaminan sosial seakan dipaksa untuk membiayai resiko yang dihadapi sendiri dan negara hanya mengelola dana tersebut. Sebagai peserta BPJS kesehatan apabila tidak membayar iuran akan dikenakan sanksi berupa denda. Hal ini sangat berbeda dengan sistem jaminan sosial dalam hukum Islam.

Bagi orang miskin atau tidak mampu membayar, maka akan ditanggung oleh pemerintah dalam bentuk Penerima Bantuan Iuran (PBI). Hal ini disebutkan dalam pasal 19 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Namun hak PBI itu tidak diterima langsung akan tetapi dialokasikan ke pihak ketiga yakni BPJS dari uang rakyat yang dipungut berupa pajak. Sehingga pada dasarnya rakyatlah yang membiayai kesehatan diri mereka dan menaggung antara sesama rakyat lainnya. Disamping itu masyarakat yang sudah terdaftar sebagai

⁸ Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2009), h. 41

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- anggota BPJS tidak mengetahui sampai kapan kepesertaannya akan berakhir, dan bagi peserta mandiri dia tidak akan tau sampai kapan dia akan membayar iuran.
- Secara perhitungan keuangan bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Peserta BPJS kesehatan yang sakit berarti untung, sebaliknya ketika tidak sakit berarti rugi. Namun dalam perhitungan keuangan, yang diperoleh peserta ada dua kemungkinan, bisa jadi untung bisa jadi rugi. Sementara kesehatan peserta yang menjadi taruhannya. Jika dia sakit dia bisa mendapatkan klaim dengan nilai yang lebih besar dari pada premi atau iuran yang dia bayarkan.
- Pada prakteknya dalam pelaksanaan BPJS ini dana yang terkumpul tidak di pisahkan, antara dana dari pemerintah atau dana tolong-menolong (*tabarru*) dan dana premi wajib iuran peserta (*bukan tabarru*). Berbeda dengan asuransi syariah, dimana dalam asuransi syariah dana kedua jenis dana tersebut di bedakan. Perbedaan pola dan mekanisme tersebut secara normatif dan tehnik pelaksanaan akan mengalami dampak hukum yang berbeda terutama ketika dilihat dari segi hukum Islam.
- Tanpa kita sadari hal tersebut merupakan suatu permasalahan muamalah dalam asuransi sosial yang perlu dikaji untuk diketahui hukumnya dalam Islam. Dimana dalam permasalahan tersebut timbul ketidakjelasan tentang pelaksanaan BPJS kesehatan dan hukumnya yang menyerupai asuransi konvensional. Ditambah adanya kebingungan di kalangan masyarakat antara memilih menjadi anggota BPJS atau tidak, sebab BPJS merupakan kebijakan dari pemerintah dimana setiap masyarakat diwajibkan untuk menjadi anggota BPJS.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik membuat sebuah penelitian dengan judul **Pengelolaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pekanbaru Dari Prespektif Fiqh Muamalah**

Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas maka memperoleh gambaran dimensi permasalahan yang luas. Namun penulis menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis memandang perlu memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus tentang *Pengelolaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pekanbaru Dari Prespektif Fiqh Muamalah*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimana Prespektif Fiqh Muamalah terhadap Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana mekanisme Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kota Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui prespektif fiqh muamalah terhadap Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Pekanbaru.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
- Adapun kegunaan yang akan dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :
- a. Untuk menambah referensi khususnya untuk penulis sendiri dan subjek dalam penelitian ini mengenai bagaimana Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kota Pekanbaru.
 - b. Untuk menambah referensi khususnya untuk penulis sendiri dan subjek dalam penelitian ini mengenai tinjauan hukum Islam terhadap Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Pekanbaru.
 - c. Sebagai syarat pelengkap untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*muamalah*) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan kepada penelitian lapangan dimana penulis langsung turun kelapangan untuk memperoleh data yang diperlukan, yaitu bertempat di kantor BPJS Kesehatan Kota Pekanbaru.

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian ini ditujukan semata-mata untuk mengetahui gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terhadap bagaimana mekanisme Pengelolaan BPJS Kesehatan yang merupakan asuransi sosial.

2. Lokasi penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah kantor Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) kesehatan Pekanbaru. Dimana kantor ini merupakan satu-satunya kantor cabang BPJS kesehatan di kota Pekanbaru.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah pihak BPJS Kesehatan dan peserta BPJS kesehatan Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Objek penelitian ini adalah Pengelolaan yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka membangun kesehatan masyarakat dan pelaksanaannya dari Presfektif Fiqh Muamalah.

Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁹ Dalam penelitian populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau keseluruhan dari objek penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak BPJS Kesehatan dan peserta BPJS Kesehatan Pekanbaru. Pihak BPJS Kesehatan yaitu karyawan BPJS kesehatan yang bekerja di kantor BPJS Kesehatan Pekanbaru yang berjumlah 54 orang termasuk pimpinan dan staf-stafnya yang bertanggungjawab pada setiap bidang di kantor BPJS Kesehatan Pekanbaru, dimana pada kantor ini terdapat 6 bidang yaitu: bagian umum, bagian keuangan, bagian kepesertaan/peluasannya peserta, bagian penjaminan manfaat rujukan (pelayanan rumah sakit), dan bagian pelayanan manfaat primer (pelayanan dokter keluarga dan puskesmas).¹⁰ Sedangkan peserta BPJS yaitu masyarakat yang menjadi anggota BPJS Kesehatan Pekanbaru.

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja wali pres, 2011), h.

¹⁰ Ade Chandra, Kepala Bidang Bagian Umum, *Wawancara*, Pekanbaru 23 Januari 2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sampel

Adapun teknik pengambilan sampel yang dilakukan penulis adalah teknik *purposive sampling* yaitu berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang di perkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat yang terdapat pada populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi di jadikan kunci untuk pengambilan sampel.

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Karyawan BPJS Kesehatan berjumlah 2 orang per bidang di kantor BPJS kesehatan jadi jumlah sampel yang di ambil dari pihak BPJS adalah 12 orang, sedangkan dari pihak peserta yaitu peserta BPJS Kesehatan yang sudah terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan sebanyak 15 orang.

5. Sumber data

Sebagaimana layaknya penelitian lapangan, dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data.

a. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari lapangan, atau data yang diperoleh dari responden dengan menggunakan angket dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh peneliti dari literatur kepustakaan seperti buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan berikut:

- a. Wawancara, yaitu komunikasi antara dua orang atau lebih yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu.¹¹
- b. Studi kepustakaan, yaitu pencarian data-data yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, dan lain sebagainya.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu semua data berhasil di simpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh kemudahan dalam penelitian ini penulis mengklarifikasi penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu :

¹¹ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2004), hlm. 180



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, analisa data, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisi gambaran umum kota Pekanbaru dan lokasi penelitian yang meliputi sejarah kantor, tujuan, visi dan misi, sasaran dan tata nilai BPJS Kesehatan.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang berisi tentang definisi BPJS Kesehatan, Konsep Ekonomi Islam, dan konsep gharar.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pekanbaru, dan tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kota Pekanbaru

1. Keadaan Wilayah

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan perkembangan dan kemajuan daerah yang sangat pesat, baik di bidang ekonomi, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan penduduk, pendidikan, sosial budaya dan bidang lainnya. Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14' - 101^{\circ}34'$ (bujur timur) dan $0^{\circ}25' - 0^{\circ}45'$ LU (Lintang Utara). Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Iklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara $34,1^{\circ}\text{C}$ hingga $35,6^{\circ}\text{C}$, dan suhu minimum antara $20,2^{\circ}\text{C}$ hingga $23,0^{\circ}\text{C}$.¹²

Berdasarkan hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk.I Riau, luas wilayah Pekanbaru ditetapkan sebesar $632,26 \text{ Km}^2$, yang terbagi kedalam 12 bagian kecamatan. Adapun daerah lain yang berbatasan langsung dengan kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut:¹³

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

¹² https://Pekanbaru.ku.com/tentang-Pekanbaru#SEJARAH_SINGKAT_PEKANBARU.
Akses 1 Mei 2019

¹³ <http://www.Pekanbaru.Go.Id/Wilayah-Geografis/>. Akses pada 1 Mei 2019



d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Penduduk Kota Pekanbaru tahun 2016 sebanyak 1.064.566 jiwa, dengan angka sex ratio (rasio jenis kelamin) sebesar 105 yang berarti terdapat sekitar 105 laki-laki pada setiap 100 perempuan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Tampan, yaitu sebanyak 269.062 jiwa (25,27 persen), sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan Sail, yaitu sebanyak 21.479 jiwa (2,02 persen). Laju pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru sebesar 2,55 persen pada tahun 2016 lebih rendah dibanding tahun 2015 yaitu sebesar 2,63 persen.

Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kota Pekanbaru didominasi oleh penduduk usia produktif, yaitu penduduk dengan usia 15-64 tahun sebesar 70,06 persen. Sedangkan penduduk kelompok umur 0- 14 tahun sebesar 27,29 persen dan penduduk berusia 65 tahun ke atas sebesar 2,65 persen.

Kepadatan penduduk di Kota Pekanbaru sebesar 1.684 jiwa/km². Kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Sukajadi sebesar 12.597 jiwa/km² dengan luas 0,59 persen dari wilayah Kota Pekanbaru. Sedangkan Kecamatan Rumbai Pesisir dengan luas 24,88 persen dari wilayah Kota Pekanbaru memiliki kepadatan penduduk terendah, yaitu hanya 461 jiwa/km².¹⁴

¹⁴ Op. Cit



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru merupakan daerah dengan penduduknya yang heterogen, beragam penduduk dengan berbagai suku dapat di jumpai di Kota Pekanbaru, antara lain suku melayu, suku minangkabau, suku jawa, suku batak, suku bugis, suku tiongha dan lainnya.

Perkembangan Pemerintahan

Perkembangan Pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, berikut beberapa perubahan Pemerintahan di kota Pekanbaru :

1. SK. Kerjaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controler berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang di kepalai oleh GUNCO
4. Ketetapan Gubernur Sumatra di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
5. UU No. 22 Tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No. 8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. UU No. 1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibu kota Provinsi Riau.
9. UU No. 18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan kota madya Pekanbaru.
10. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan kota madya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

Visi kota Pekanbaru pada tahun 2021 sesuai dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, yaitu” *Terwujudnya kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan Melayu, menuju masyarakat sejahtera berlandaskan iman dan taqwa*”. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi Kota Pekanbaru yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kemampuan/ keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.
3. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, enegeri listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota.
5. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
6. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

B. Kantor BPJS Kesehatan Pekanbaru

BPJS Kesehatan merupakan salah satu instansi Nasional yang memiliki kantor cabang utama disetiap daerah regional di Indonesia. Dimana setiap provinsi di Indonesia memiliki kantor cabang utama dari Instansi-instansi nasional, begitu pula dengan Pekanbaru. Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi Riau terdapat berbagai kantor regional maupun kantor cabang utama dari setiap instansi Nasional, salah satunya yaitu BPJS Kesehatan.

Kantor BPJS Kesehatan Cabang Utama Pekanbaru beralamat di jalan Central Sudirman N0. 30 & 32 Tangkerang Tengah Pekanbaru 28282 Telp. (0761) 32004, 862878 Hotline : 0812 7522553. Adapun kegiatan dikantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru yaitu pelayanan masyarakat seperti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

elayanan pendaftaran calon peserta BPJS Kesehatan, Pemabayaran Iuran, dan kepentingan umum lainnya.¹⁵

1. Struktur Organisasi

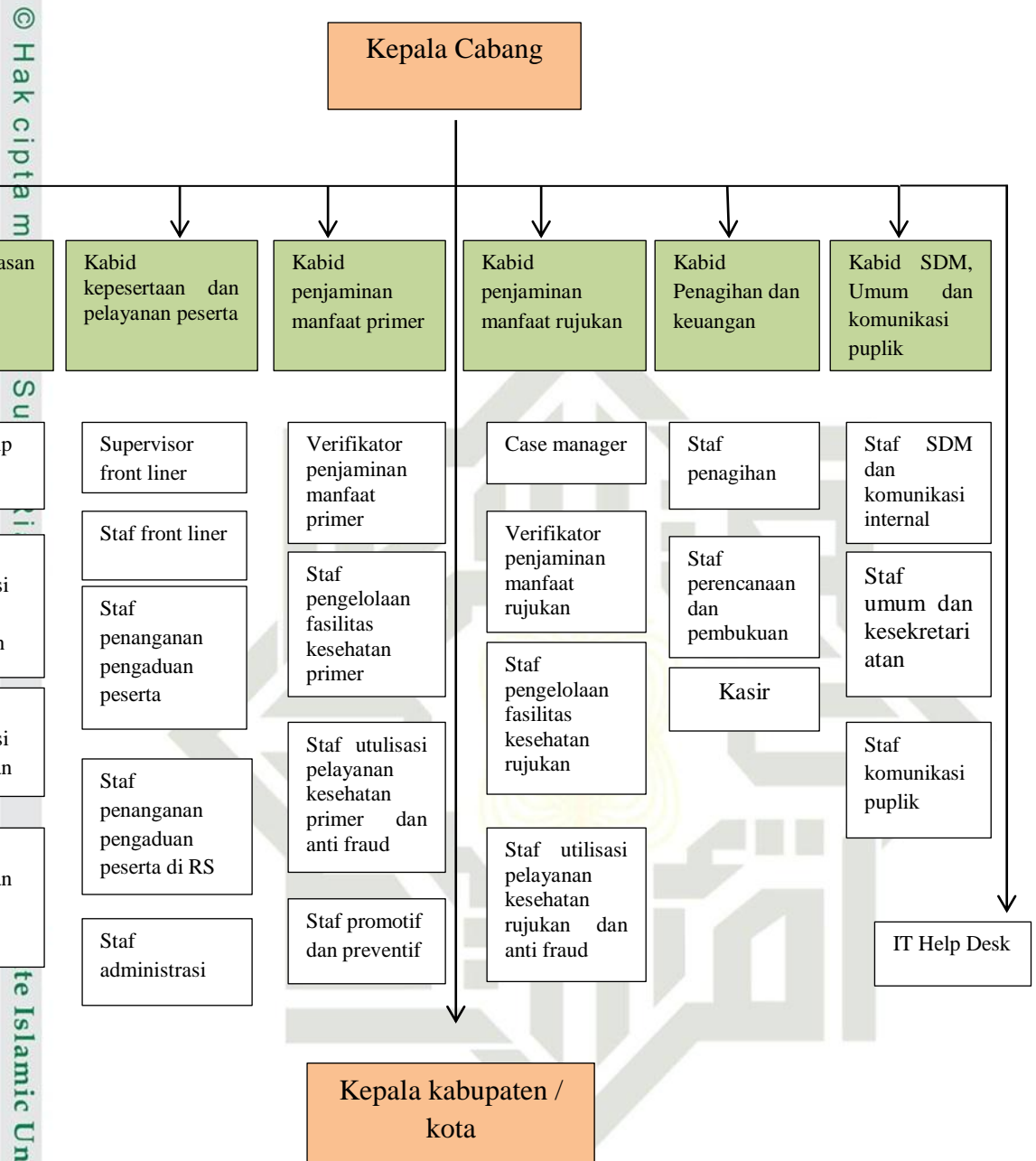
Secara umum struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang dapat mengidentifikasikan sejumlah tugas-tugas dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu bagi pihak pimpinan struktur organisasi sangat berguna sebagai pedoman untuk mengatur dan mengkoordinir segala aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.

Dengan demikian struktur organisasi merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu perusahaan, karena didalam struktur organisasi ini akan tampak pembagian kerja dan tanggung jawab yang jelas dan dapat mempermudah dalam mengarahkan, mengawasi setiap staff atau karyawan perusahaan yang bersangkutan seperti Badan Peyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pekanbaru ini.

Adanya tujuan struktur oraganisasi ini adalah untuk menghindari terjadinya kesimpang siuran dan juga bermaksud agar wewenang dan tanggung jawab dapat dibagi sehingga suatu pekerjaan dapat terselesaikan dengan memuaskan (baik). Kemudian untuk lebih jelasnya dapat kita lihat struktur organisasi sebagai berikut :

¹⁵ Ade Candra, kepala bidang bagian umum BPJS kesehatan kantor cabang utama Pekanbaru, wawancara . Pekanbaru, 23 Januari 2019.

- © Hak cipta m
- Hak Cipta Dilindungi
1. Dilarang mengutip
 - a. Pengutipan hanya
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tujuan dibentuknya BPJS Kesehatan

Tujuan di bentuknya BPJS Kesehatan adalah menciptakan kesejahteraan kepada seluruh rakyatnya. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia membentuk penyelenggaraan jaminan sosial yaitu BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) dimana bertujuan untuk memberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.¹⁶

3. Visi dan misi BPJS Kesehatan.

Terwujudnya jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi.

1. Memberikan layanan terbaik kepada peserta dan masyarakat
2. Memperluas kepesertaan program jaminan kesehatan mencakup seluruh penduduk Indonesia.
3. Bersama menjaga kesinambungan finansial program jaminan kesehatan.

4. Sasaran BPJS Kesehatan

1. Tercapainya kepesertaan semesta sesuai peta jalan menuju jaminan Kesehatan Nasional tahun 2019
2. Tercapainya jaminan pemeliharaan kesehatan yang optimal dan berkesinambungan.
3. Terciptanya kelembagaan BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya.

5. Kewajiban BPJS kesehatan

1. melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta¹⁷
2. memungut dan mengumpulkan iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja;
3. menerima Bantuan iuran dari Pemerintah

¹⁶ <https://kesehatanbpjs.blogspot.com/2014/11/tujuan-bpjs-dan-program-jaminan-sosial.html>. Akses pada 14 Juli 2019

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;
5. mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;
6. membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial;
7. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.

6. Tata nilai Organisasi

1. Integritas

Merupakan prinsip dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab melalui keselarasan berpikir, berkata dan berperilaku sesuai keadaan sebenarnya.

2. Profesional

Merupakan karakter dalam menjalankan tugas dengan kesungguhan, sesuai kompetensi dan tanggung jawab yang diberikan.

3. Pelayanan prima

Merupakan tekad dalam memberikan pelayanan terbaik dengan ikhlas kepada seluruh peserta.

4. Efisiensi Operasional

Merupakan upaya untuk mencapai kinerja optimal melalui perencanaan yang tepat dan penanggungan yang rasional sesuai kebutuhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan BPJS Kesehatan

1. Pengertian Pengelolaan BPJS Kesehatan

Pengelolaan merupakan serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu dengan menggunakan orang-orang tertentu sebagai pelaksananya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bukanlah asuransi sosial/ jaminan sosial, melainkan sebuah lembaga atau badan hukum yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.¹⁸

Pembentukan BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sehingga kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/ atau anggota keluarganya bisa terpenuhi, yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar hidup” adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁹

BPJS Kesehatan berawal dari diterbitkannya peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 1968 dengan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) yang mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negara dan penerima pensiun beserta keluarganya.

¹⁸ Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 262

¹⁹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 1984. BPDPK pun berubah status dari sebuah badan di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi BUMN, yaitu PERUM HUSADA BHAKTI (PBH), yang melayani jaminan kesehatan bagi PNS, Pensiunan PNS, Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan anggota keluarganya.

Pada tahun 1992, PBH berubah status menjadi PT. Askes (Persero) melalui PP No. 6 Tahun 1992. Pada tahun 2005, PT Askes (Persero) dipercaya pemerintah untuk melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM) yang selanjutnya dikenal menjadi program Askeskin dengan sasaran peserta masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya di bayarkan oleh pemerintah pusat. Dengan melalui tahapan tersebut maka secara resmi beroperasilah BPJS Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014 sebagai transformasi dari PT Askes (Persero). di bentuk berdasarkan UU No. 24 tahun 2011 yang di amanatkan dalam Undang-Undang No. 24 tentang Sistem Jaminan Nasional.²⁰

Asas BPJS

Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disingkat dengan UU BPJS), mengatur mengenai asas/prinsip. Tidak jelas apa maksud pembuat undang-undang mengatur hal tersebut dalam 2 pasal berbeda yang seolah-olah artinya juga berbeda. Dalam terminologi hukum, baik asas atau prinsip, keduanya memiliki arti dan makna yang sama, yaitu sesuatu yang dapat

²⁰ www.bpjs-kesehatan.go.id Di sadur tanggal 2 Februari 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan sebagai alas, dasar, tumpuan, tempat untuk menyandarkan, mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan, yakni dasar bagi pembentukan norma hukum.²¹ Menurut pasal 2 UU BPJS, bahwa penyelenggaraan sistem jaminan sosial oleh BPJS didasarkan pada asas:

- a. Kemanusiaan, yaitu asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia.
- b. Manfaat, yaitu asas manfaat adalah asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.
- c. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah asas yang bersifat adil.²²

Selanjutnya dalam pasal 4 disebutkan lagi bahwa BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip:

- a. Kegotongroyongan, yaitu prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat Gaji, Upah, atau penghasilan.
- b. Nirlaba, yaitu prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.
- c. Keterbukaan, yaitu prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.

²¹ *Op. Cit*, h. 262-263

²² *Op. Cit*, h. 263



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kehati-hatian, yaitu prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib.
- e. Akuntabilitas, yaitu prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Portabilitas, yaitu prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Kepesertaan bersifat wajib, yaitu prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.
- h. Dana amanat, yaitu iuran dan hasil pengembangan merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.
- i. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

Ruang Lingkup

Ada dua bentuk BPJS yang diperkenalkan oleh Undang-Undang

yaitu :

- a. BPJS Kesehatan, dan
- b. BPJS Ketenagakerjaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila BPJS Kesehatan semata-mata hanya menyeleggarakan program jaminan kesehatan saja, maka BPJS Ketenagakerjaan meliputi ruang lingkup yang lebih luas, yaitu menyelenggarakan program:

- a. Jaminan hari tua.
- b. Jaminan pensiun.
- c. Jaminan kematian.

Menurut ketentuan pasal 7 UU BPJS, ditegaskan bahwa BPJS sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden. Sebaliknya, penyelenggaraan BPJS selama ini dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tertunduk pada ketentuan-ketentuan hukum privat, sehingga boleh dinyatakan sebagai badan hukum privat, seperti PT Jamsostek (Persero), PT Askes (Persero), dan PT Taspen (Persero).

Fungsi, Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban.

Pada pembahasan awal sudah disinggung bahwa BPJS adalah badan hukum yang berfungsi atau berperan menyelenggarakan program jaminan sosial, yang bertujuan menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Pada pasal 9 UU BPJS kemudian dipertegas kembali fungsinya dimaksud, dimana BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun dan program jaminan hari tua.

Selanjutnya pada pasal 10 dijelaskan, apa saja tugas yang harus dilakukan agar fungsi atau peran BPJS itu berjalan dengan baik. tugas yang dimaksud adalah:

- a. Melakukan dan atau menerima pendaftaran peserta
- b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja
- c. Menerima bantuan iuran dari pemerintah
- d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta
- e. Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program jaminan sosial
- f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial
- g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.

BPJS dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya, perlu dopsenjatai dengan memberi beberapa wewenang sehingga tujuan yang mulia yang diembannya bisa tercapai. Pasal 11 UU BPJS sudah mengatur beberapa wewenang BPJS sebagai penyelenggara jaminan sosial, yaitu berwenang untuk:

- a. Menagih/ meminta pembayaran iuran dalam hal terjadi penunggakan kemacetan, atau kekurangan pembayaran iuran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.
- c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional.
- d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah.
- e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan.
- f. Mengenaikan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya.
- g. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial.

BPJS dalam melaksanakan kewenagannya memiliki hak. Hak dimaksud adalah untuk memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hak untuk memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dari DJSN 6 bulan.

Di samping ada kewenangan dan hak, sebagaimana dijelaskan di atas, BPJS memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakannya. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah:

- a. Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta
- b. Mengembangkan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS untuk sebesar-sebesarnya kepentingan peserta.
- c. Memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pegembaliannya.
- d. Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang sistem jaminan sosial nasional.
- e. Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan berlaku.
- f. Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajiban.
- g. Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- h. Memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang lazim dan berlaku umum.
- j. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial.
- k. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada presiden dengan tembusan kepada DSJN.

BPJS sebagai badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan undang-undang, bertanggung jawab atas pemenuhan tugasnya kepada presiden. Tanggung jawab tersebut dimanifestasikan melalui orang-orangnya yang meliputi dewan pengawas dan direksi.

B. Asuransi (*Takaful*)

1. Pengertian Asuransi (*Takaful*)

Asuransi disebut juga *takaful*, *ta'im*, atau *tadhamun*, yaitu suatu usaha saling melindungi dan saling tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* melalui akad sesuai dengan syariah.²³ pendapat lain di kemukakan oleh fahruddin, dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu perjanjian keberuntungan.

Muhammad Syakir Sula mengartikan *takaful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko diantara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang

²³ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 301



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya.²⁴ Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, digunakan istilah *takaful al-ijtima'i* atau solidaritas yang diartikan sebagai sikap anggota masyarakat Islam yang saling memikirkan, memerhatikan, dan membantu mengatasi kesulitan.

Menurut pasal 246 *Weetboek van Koophandel* (kitab Undang-Undang Perniagaan) bahwa yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu peretujuan yang menyetujui bahwa pihak yang meminjam berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diterima oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.

Asuransi juga dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dalam undang-undang tersebut didefinisikan bahwa: asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.²⁵

²⁴ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 223

²⁵ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Sinar Grafika, 2012), hlm. 79



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Defenisi asuransi juga terdapat pada KUHD dalam bab 9 pasal 246 yang berbunyi: Asuransi sebagai suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas adanya.²⁶

Dalam Islam, asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Dalam bahasa arab, asuransi disebut *at-ta'min*, *at-takaful*, dan *tadamun*.²⁷

1. *At-ta'min*

At-ta'min penanggungan disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggungan disebut *Mu'amman lahu*. *At-ta'min* diambil dari kata *amanah* yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.

2. *Takaful*

Kata *takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu* yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. *Takaful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas risiko yang lain. Konsep *takaful* didasarkan pada solidaritas, responsibilitas, dan persaudaraan di antara anggota dimana para partisipan sepakat untuk sama-sama menanggung

²⁶ Walid Nopriansyah, *Asuransi Syariah : Berkah Terakhir yang tak Terduga*, (Yogyakarta: C. V ANDI OFFSET, 2016), h. 9

²⁷ *Ibid.*, h. 11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerugian tertentu dan dibayar dari aset-aset yang telah ditetapkan. Kata *takaful* tidak dijumpai dalam al-Qur'an, namun demikian ada sejumlah kata yang seakar dengan kata *takaful*, seperti dalam QS. Thaha (20): 40:

...هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَخْفَىٰ...

“Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?”

Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain, mengandung makna pertanggungan atau saling mengandung. Namun dalam praktiknya istilah yang paling populer sebagai istilah lain dari asuransi dan juga paling banyak digunakan diberbagai negara adalah istilah *takaful*.

3. *Tadamun*

Asuransi syariah juga dapat disebut dengan *tadamun* yang berasal dari kata *tadama* yang berarti saling mengandung, bertujuan untuk menutup kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami seseorang.

Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya nomor 21/DSN/MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah memberikan definisi asuransi syariah (*ta'minn*, *Takaful*, atau *Tadamun*) sebagai usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau



‘*tabarru*’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.²⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa asuransi jiwa syariah adalah suatu bentuk kerjasama atau perjanjian untuk saling tolong-menolong yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin meminimalkan resiko yang diakibatkan oleh resiko kematian, resiko kesehatan, resiko kecelakaan, yang dilakukan sesuai syariat Islam dengan tidak adanya unsur penipuan, perjudian dan riba.²⁹

Dari rumusan tersebut, dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya asuransi atau pertanggungan merupakan suatu ikhtiar dalam rangka menanggulangi adanya resiko. Secara umum yang dimaksud dengan resiko adalah setiap kali orang tidak dapat menguasai dengan sempurna, atau mengetahui lebih dahulu mengenai masa yang akan datang. Dengan bahasa lain risiko adalah :

- a) Kemungkinan terjadinya resiko yang tidak diinginkan/ diharakan terjadi, atau ;
- b) Peristiwa yang diinginkan diharapkan terjadi, dan keadaan ini lazim dikatakan sebagai kehilangan sebagai penurunan atau pemusnahan nilai ekonomi.

Akhirnya, risiko dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Kemungkinan kehilangan atau kerugian

²⁸ *Ibid.*, h. 12

²⁹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kemungkinan penyimpangan harapan yang tidak menguntungkan karena kemungkinan penyimpangan harapan merupakan suatu harapan.

Antara asuransi dan risiko mempunyai keterkaitan yang sangat erat, sebab asuransi adalah menanggulangi resiko. Tanpa adanya resiko, asuransi/pertanggungan tidak akan ada.

Dasar Hukum Asuransi (*Takaful*)

Mengenai ketentuan hukum asuransi pada umumnya, pada syariat Islam dikategorikan ke dalam masalah-masalah ijtihad. Sebab tidak ada penjelasan resmi baik dalam al-qur'an maupun hadis. Di samping itu para imam mazhab juga tidak memberikan pendapatnya tentang hal tersebut, sebab ketika itu masalah perasuransian belum dikenal.

K. H ahmad Azhar Basyir, M. A mengungkapkan bahwa perjanjian perasuransian adalah hal yang baru dan belum pernah terjadi pada masa Rasulullah saw dan para sahabat, serta *tabi'in*. Di dunia Barat asuransi pertama kali dikenal pada tahun 1182. Waktu itu orang-orang Yahudi diusir dari Prancis untuk menjamin risiko barang-barang mereka yang di angkut keluar lewat laut.

Sementara itu, untuk Indonesia, maskapai asuransi yang pertama sekali berdiri adalah *Batavianche Zee and Brand Assuratie Maatschappij* pada tahun 1843. Hingga pecah Perang Dance II, perusahaan asuransi di Indonesia umumnya masih berada di tangan pihak asing, seperti Inggris,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Belanda, dan lain-lain, baik sebagai perusahaan yang berdiri sendiri maupun perwakilan dari perusahaan asing. Ada dua perusahaan asuransi nasional di Indonesia yang berasal dari masa sebelum perang, yaitu Bumiputera dan Lloyd Indonesia.

Asuransi dewasa ini merupakan sebuah lembaga besar dan modern yang sudah diterima keberadaannya oleh masyarakat secara luas, tak terkecuali di dalamnya umat Islam. Namun di kalangan umat Islam masih terdapat anggapan bahwa asuransi merupakan usaha yang tidak sejalan dengan ajaran Islam karena orang yang ikut asuransi sama halnya dengan orang yang mengingkari rahmat Allah.³⁰ Mereka bersikukuh dalam segala kondisi bahwa Allah-lah yang menentukan segalanya dan yang memberikan rezeki pada manusia, hal ini diperkuat firman Allah SWT dalam Q. S Huud (11): 6 :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا
كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ٦

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah -lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh)”

Selain alasan diatas, bagi mereka yang menolak asuransi juga menambahkan alasannya bahwa di dalam asuransi terdapat ketidakpastian dan terkesan mendahului takdir. Berdasar kepada beberapa alasan seperti tersebut di muka menurut kelompok asuransi hukumnya haram.

³⁰ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 241



Namun di pihak lain terdapat kelompok yang tidak sejalan dengan kelompok di atas yang secara jelas menolak keberadaan asuransi. Allah memang sudah menyediakan segalanya di alam ini untuk kehidupan manusia, namun semua itu membutuhkan usaha pengelolaan yang sebaik-baiknya sehingga manusia memiliki masa depan yang cerah. Orang yang ikut asuransi menurut pendapat yang membolehkan ini merupakan ikhtiar untuk menghadapi masa depan dan masa tua yang lebih cerah karena kehidupan ini akan menghadapi bermacam-macam bahaya yang tidak disangka—sangka dan terkadang mendadak, seperti penyakit, pengangguran, usia tua, mati, kecurian, kebakaran, karam/ tenggelam, gempa bumi dan sebagainya.³¹ Dengan memasukkan dirinya atau hartanya kepada asuransi berarti ia berusaha untuk mengantisipasi dalam mengatasi penderitaan atau kerugian yang akan dialaminya. Berdasarkan kepada beberapa alasan seperti disebut di muka, maka kelompok kedua ini berpendapat bahwa asuransi ini hukumnya halal.³² Sementara dalam kaidah *ushul fiqh* dikatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya, atau pada mudarat dihindarkan sedapat mungkin atau segala mudarat (bahaya) harus dihilangkan.³³ Kenyataan yang dikemukakan di atas memberi interpretasi bahwa apabila berbicara tentang dasar hukum perasuransian menurut syariat Islam, hanya dapat dilakukan dengan metode *ijtihad*. Melalui *ijtihad* itu pulalah dicari dan ditetapkan hukumnya.

³¹ *Ibid*, hlm. 242

³² *Ibid*

³³ Nawawi, *Op. Cit*, h. 302

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengambil ketetapan hukum dengan menggunakan metode ijtihad dapat dipergunakan beberapa cara, antara lain:

- a. *Maslahah Mursalah*/ untuk kemaslahatan umum
- b. Melakukan interpretasi atau penafsiran hukum secara analogi (metode kias) (Masifuk Zuhdi, 1992: 128-1230)

Dengan penggunaan metode di atas tentunya akan melahirkan pendapat tersebut akan dipengaruhi oleh masing-masing ahli. Adapun hasil ijtihad para ahli hukum Islam tentang hukum asuransi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Pendapat pertama, asuransi dengan segala bentuk perwujudannya dipandang haram menurut ketentuan hukum Islam.
- b) Pendapat kedua, asuransi dengan segala bentuknya dapat diterima dalam syariat Islam.
- c) Pendapat ketiga, asuransi sosial diperbolehkan, sedangkan asuransi yang bersifat komersial tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan syariat Islam.
- d) Pendapat keempat, asuransi dengan segala jenisnya di pandang subhat.

Dari silang pendapat tentang keberadaan asuransi dalam hukum Islam seperti di jelaskan diatas, hal ini menjadikan hukum asuransi menjadi permasalahan *ikhtilaf* di kalangan para ulama yang dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ulama yang mengharamkan mutlak tanpa terkecuali, diantaranya Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqilii (mufti Yordania), Yusuf Qardhawi, Muhammad Bakhi al-Mu'thi (mufti Mesir), dan Isa Abduh, mereka berasan bahwa:
 - a. Asuransi sama dengan judi.
 - b. Asuransi mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian.
 - c. Asuransi mengandung unsur riba karena pihak tertanggung (pemilik polis) akan memperoleh sejumlah uang yang jumlahnya lebih besar dari pada premi yang dibayarkan.
 - d. Asuransi mengandung pemerasan karena pemegang polis jika tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya akan hilang premi yang telah dibayarkan atau dikurangi.
 - e. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.
 - f. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, hal ini sama saja dengan sikap mendahului takdir Allah .
2. Ulama yang menghalalkan secara mutlak tanpa terkecuali di antaranya adalah Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad al-Bahi, Muhammad Yusuf Musa, dan Abdurrahman Isa, mereka berasan bahwa :
 - a. Tak ada *nash*, baik dari Al-Qur'an maupun Hadis yang melarang asuransi.
 - b. Adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Keduanya saling memperoleh keuntungan.
 - d. Asuransi dapat menolong kepentingan umum. Karena premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk kegiatan produktif, seperti proyek dan pembangunan.
 - e. Asuransi termasuk koperasi yang dilandasi oleh semangat tolong-menolong.
 - f. Asuransi dapat diqiyaskan dengan sistem pensiun seperti taspen.
3. Muhammad Abu Zahra membolehkan hukum asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial. Sedangkan Abdullahh bin Zaid membolehkan asuransi kecelakaan dan mengharamkan asuransi jiwa. Masing-masing alasannya secara berurutan hampir sama dengan yang dikemukakan oleh kelompok pertama dan kedua sebagaimana tersebut di atas, hanya ia berusaha mencari titik temu diantara keduanya.
 4. Terdapat pula ahli fikih yang menganggap hukum asuransi itu syubhat, sebab tidak ditemukan dalil yang secara tegas menyebut keharaman dan kehalalannya.

3. Prinsip-prinsip dasar asuransi syariah

Asuransi harus dibangun dengan pondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh. Dalam asuransi harus tertanam prinsip dasar sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tauhid (Unity)

Prinsip tauhid merupakan hal terpenting dalam melakukan kegiatan ekonomi dan merupakan bagian dasar utama dalam pondasi menjalankan syari'at Islam. Asuransi syariah tentu harus mengoprasionalkan nilai-nilai ketuhanan sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Hadid (57): 4

...وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ...

“Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada....”

2. Keadilan (Justice)

Prinsip berkeadilan dalam menjalankan sistem asuransi syariah merupakan jalan keterbukaan dan kepedulian antara pihak-pihak yang terikat dengan akad.

3. Tolong menolong (ta'awun)

Dalam berasuransi harus didasari kemauan untuk saling tolong menolong dan saling menghormati antar anggota yang terikat pada akad. Dalam hal ini ditegaskan firman Allah SWT. QS. Al-Maidah (5): 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kerjasama

Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada pada dunia bisnis. Pada asuransi syariah, prinsip kerjasama dapat berbentuk perjanjian, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.

Mudharabah merupakan kerja sama di mana pemilik modal menyerahkan dana (premi) kepada perusahaan asuransi. Dana yang terkumpul akan diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak bekerjasama dengan sama-sama menyerahkan modalnya untuk diinvestasikan pada bidang-bidang yang menguntungkan. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai porsi nisbah yang disepakati.

5. Amanah

Prinsip amanah pada sistem asuransi syariah berbasis pada nilai-nilai akuntabilitas. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi peserta untuk mengakses laporan keuangan. Prinsip amanah ini akan melahirkan saling percaya. Untuk setiap perusahaan asuransi syariah wajib memberikan laporan keuangan yang diterima dari peserta karena transparansi dalam menjalankan usaha ini harus sesuai dengan syariat Islam.

6. Kerelaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip kerelaan pada asuransi syariah diterapkan pada setiap peserta sehingga tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat dalam akad.

7. Larangan riba

Dalam setiap transaksi seorang muslim tidak dibenarkan untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan atau secara bathil, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4):

29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

8. Larangan maisir (judi)

Prinsip larangan maisir (judi) dalam sistem asuransi syariah untuk menghindari satu pihak yang untung dan pihak yang lain rugi. Asuransi syariah harus berpegang teguh menjauhkan diri dari unsur judi dalam berasuransi.

9. Larangan Gharar (ketidakpastian)

Gharar dalam pandangan ekonomi Islam terjadi apabila dalam suatu kesepakatan/perikatan antara pihak-pihak yang terikat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi ketidakpastian dalam jumlah profit (keuntungan) maupun modal yang dibayarkan (premi).

Gharar (Ketidakpastian)

Ketidakpastian adalah realitas dalam kehidupan manusia. Semua umat manusia dihadapkan dengan ketidakpastian dalam kehidupan sosial dan bisnis, resiko selalu meliputi kita apa pun yang kita lakukan. Islam tidak mengabaikan realitas ini dan tidak melarang manusia menghadapi resiko dan ketidakpastian dalam hidup.³⁴

Yang tidak diijinkan atau dilarang adalah bertransaksi atau berjual beli yang mengandung unsur ketidakpastian atau *gharar* tersebut. Dalam asuransi umum konvensional terdapat gharar karena konsep asuransi adalah mekanisme memindahkan resiko dimana individu atau organisasi dapat menjual ketidakpastian dengan kepastian.³⁵

D. Mekanisme Pengelolaan Dana

Perusahaan asuransi syariah diberi amanah untuk mengelola premi dengan cara yang halal dan memberikan santunan kepada pihak yang mengalami musibah sesuai dengan akad yang telah dibuat. Dalam mekanisme pengelolaan premi nasabah, yang sering dipakai dalam operasional terbagi menjadi dua sistem.

Sistem pada produk saving (tabungan)

Pada produk ini peserta wajib menyerahkan premi kepada perusahaan. Besar kecilnya premi tergantung keinginan peserta. Akan

³⁴ Muhaemin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik : upaya menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 25

³⁵ Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi yang menentukan besar kecilnya premi yang harus dibayarkan adalah pihak perusahaan. Dalam produk ini setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisahkan dalam dua rekening, yaitu rekening tabungan peserta.

- a. Rekening *tabarru*. Dana pada rekening *tabarru* akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dan perjanjian berakhir (jika ada surplus dana).
- b. Rekening tabungan (*saving*) peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, dan akan dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia.

2. Sistem pada produk non-saving (tidak ada tabungan)

Pada produk ini premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan ke rekening *tabarru*. Pada mekanisme pengelolaan dana ini terdapat perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional dimana pada asuransi konvensional tidak ada pemisah antara dana peserta dan dana *tabarru*. semua tercamur menjadi satu dan status dana tersebut adalah dana perusahaan, perusahaan bebas mengelola dan menginvestasikan kemana saja tanpa ada pembatasan halal atau haram.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan penulis melalui metode observasi, wawancara serta angket, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan BPJS kesehatan termasuk di dalamnya penghimpunan iuran dan pengalokasian jaminan kesehatan kepada peserta. besaran iuran yang diterapkan BPJS kesehatan digolongkan berdasarkan kemampuan peserta sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2011, berbeda dengan peserta PBI (penerima bantuan iuran) besaran iurannya sudah ditetapkan langsung oleh pemerintah dan dibayar oleh pemerintah. Sedangkan denda yang diterapkan pada peserta yang tidak membayar iuran tujuannya adalah untuk memberikan efek jera pada peserta. Dalam mekanisme pengelolaan BPJS kesehatan terdapat adanya pemisahan antara dana iuran dengan dana yang bersumber dari pemerintah.
2. Tinjauan fiqh Muamalah terhadap pengelolaan BPJS Kesehatan adalah sebagaimana tujuan BPJS Kesehatan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat dan menjadikan sistem tolong-menolong sebagai pedomannya BPJS Kesehatan memberikan banyak manfaat pada peserta dalam hal kesehatan, maka dapat dikatakan bahwa BPJS Kesehatan sebagai jaminan sosial telah berjalan sesuai dengan konsep jaminan sosial menurut Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu BPJS Kesehatan juga menetapkan adanya denda bagi peserta yang terlambat atau tidak membayar iuran sedangkan peserta tersebut mampu untuk membayar iuran, kemudian peserta BPJS juga tidak mengetahui dengan pasti apakah mereka akan mendapatkan manfaat pelayanan dari BPJS atau tidak, dimana hanya peserta yang melakukan klaim-lah yang mendapatkan manfaat kesehatan dari BPJS Kesehatan. Unsur inilah yang dipermasalahkan dalam BPJS Kesehatan, namun ketika di lihat dari aspek *maqahsid syariah* kontemporer yang lebih mengedepankan kemaslahatan sosial dibandingkan kemaslahatan individu maka menjadi anggota BPJS adalah boleh dengan pertimbangan yang darurat.

B. SARAN

1. Kepada para peserta BPJS Kesehatan untuk memantau mekanisme pengelolaan BPJS Kesehatan, dan untuk menunaikan kewajiban dalam membayar iuran yang sudah ditetapkan sehingga kecil kemungkinan untuk terlibat dalam riba, karena kerjasama antara pihak BPJS Kesehatan dan peserta sangat dibutuhkan dalam hal ini, untuk terwujudnya sistem gotong royong yang dimaksudkan.
2. Kepada pihak BPJS Kesehatan untuk tetap memperhatikan tujuan utama dari program tersebut, menjelaskan dengan cermat hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan sehingga peserta dapat menjalankan kewajibannya, dan mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Isbandi Rukminto, 2013, *Kesejahteraan Sosial : pekerjaan sosial, pembangunan sosial, dan kajian pembangunan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Candra, kepala bagian umum BPJS Kesehatan Pekanbaru, wawancara 23 Januari 2019
- Anti, peserta PBI BPJS Kesehatan Pekanbaru, wawancara April 2019
- Dea, staf bagian umum BPJS Kesehatan Pekanbaru, wawancara 23 Januari 2019
- Dewi, Gemalla, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Peransurashian di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djazuli, 2010, *kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana
- Euis Amalia, 2010, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, Jakarta: Gramedia Publishing.
- Ismanto, Kuat, 2009, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Iqbal Muhaimin, 2005, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik: Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*, Jakarta: Gema Insani Press
- Kasmir, 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Press
- K. Luthis, Suhrawardi, Farid Wajdi, 2012, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana
- Mulyana, Deddy, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya
- Mulhadi, 2017, *Dasar-dasar Hukum Asuransi*, Depok: Rajawali Pres
- Mustafa Dieb al-Bugha, Muhyiddin Mistu, 2014, *Al-Wafi : Syarah Hadis Arba'in Imam An-Nawawi*, penerjemah, Rokhidin Wakhid, Jakarta: Qisthi Press
- Nawawi, Ismail, 2012, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Nazir, Moh, 2005, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
- Shabir, Muslich, *Riyadhus Shalihin : terjemah 2*, Semarang: Karya Toha Putra
- Salma, peserta golongan II BPJS Kesehatan Pekanbaru, wawancara april 2019
- Sidiq Sapiudin, 2016, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana
- Sri Nuhayati, Wasilah, 2013, *Akuntansi Syaariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat
- Suherdi, Hendi, 2011, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers
- Sula, Muhammad Syakir, 2004, *Asuransi Syariah (life and general) : konsep dan sistem operasional*, Jakarta: Gema Insani Press
- Suma, Muhammad Amin, 2008, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Unggono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja wali
 pres
 yaafinal, staf BPJS Kesehatan Pekanbaru , wawancara Februari 2019
 Undang- undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan
 Sosial
 opriansyah, Walidi, 2016, *Asuransi Syariah : Berkah terakhir tang tak terduga*,
 Yogyakarta: C. V Andi Offset
 Wirduyaningsih, 2005, *Bank dan Asuransi Islamdi Indonesia*, Jakarta: Kencana
https://Pekanbaru.ku.com/tentangPekanbaru#SEJARAH_SINGKAT_
 PEKANBARU
<https://www.Pekanbaru.Go.Id/Wilayah-Geografis/>.
[https://kesehatanbpjs.blogspot.com/2014/11/tujuan-bpjs-dan-program-jaminan-](https://kesehatanbpjs.blogspot.com/2014/11/tujuan-bpjs-dan-program-jaminan-sosial.html)
 sosial.html.
<http://www.Pekanbaru.go.id/visi-kota/>.
www.bpjs-kesehatan.go.id

Panduan Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan

: Pihak BPJS Kesehatan Pekanbaru

: Wawancara penelitian (riset)

1. Dimanakah alamat lengkap dari kantor cabang utama BPJS Kesehatan Pekanbaru ?
2. Berapa jumlah divisi di kantor utama BPJS Kesehatan Pekanbaru, dan berapa anggota karyawan yang bertanggung jawab pada masing-masing divisi ?
3. Berapa jumlah keseluruhan karyawan di kantor utama BPJS Kesehatan Pekanbaru ?
4. Berapa jumlah keseluruhan peserta BPJS kesehatan Pekanbaru ?
5. Kapan peserta dinyatakan aktif sebagai anggota BPJS Kesehatan ?
6. Berapa golongan/ tingkatan peserta BPJS Kesehatan ?
7. Bagaimana cara menentukan tingkatan atau golongan yang berhak diterima anggota BPJS Kesehatan ?
8. Berapa besaran iuran yang diwajibkan kepada peserta ?
9. Dalam bentuk apakah iuran yang di setorkan oleh peserta setiap bulannya?
10. Apakah ada jaminan lain terhadap peserta bila peserta BPJS Kesehatan tidak menggunakan hak nya ? jika ada, dalam bentuk apa jaminan tersebut ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Apakah iuran yang di bayarkan tersebut memiliki jangka waktu tertentu ?
12. Dimana anggota BPJS Kesehatan dapat mengajukan klaim ?
13. Pada peserta BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3, apakah ada perbedaan pelayanan ketika mendapatkan pelayanan kesehatan ?
14. Pada penyakit ringan, apakah klaim yang dilakukan peserta BPJS Kesehatan di tanggung seluruhnya oleh BPJS Kesehatan ?
15. Pada penyakit sedang dan berat, apakah klaim yang dilakukan peserta BPJS Kesehatan di tanggung seluruhnya oleh BPJS Kesehatan ?

Panduan Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ujutan : Peserta BPJS Kesehatan Pekanbaru

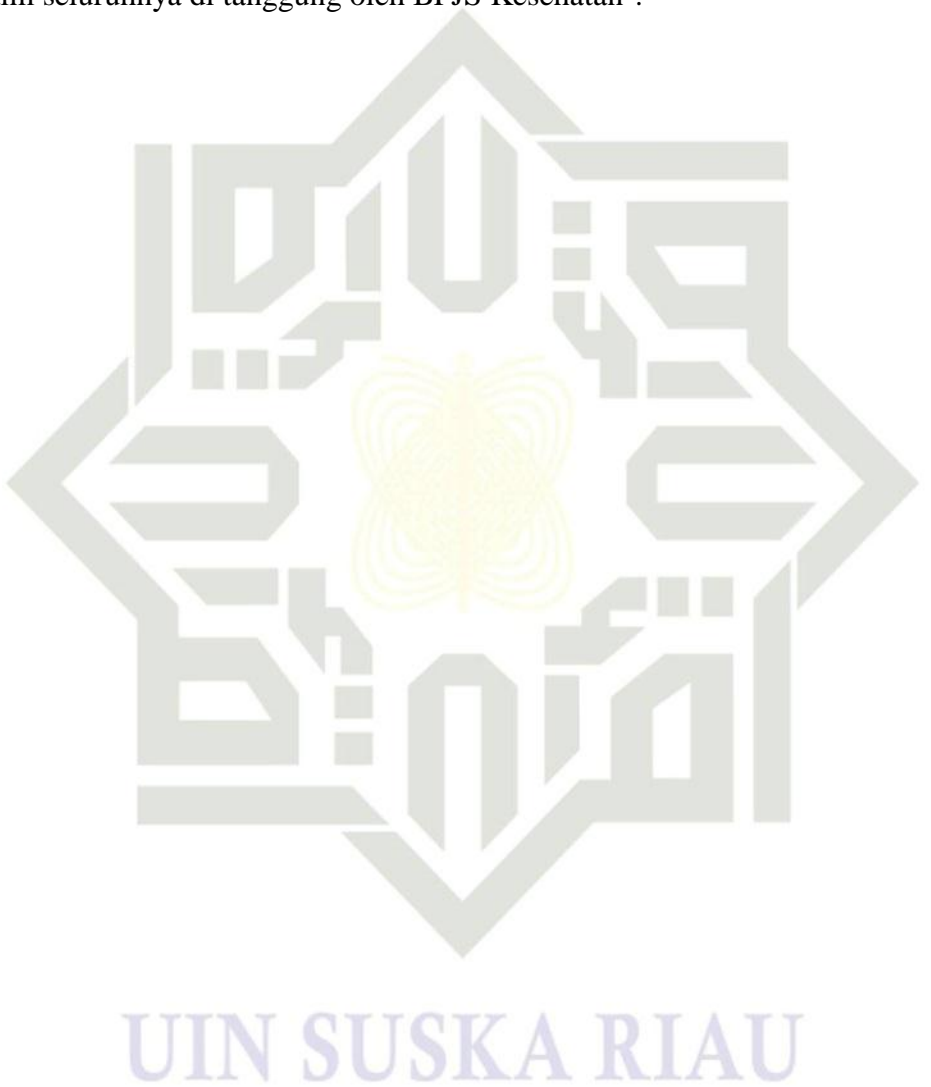
: Wawancara penelitian (riset)

1. Sejak kapan Bapak/Ibu/saudara/i terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan ?
2. Pada golongan/ kelas berapa Bapak/Ibu/saudara/i terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan ?
3. Berapa besaran iuran yang harus Bapak/Ibu/saudara/i bayarkan setiap bulannya ?
4. Sebagai anggota BPJS Kesehatan apakah Bapak/Ibu/saudara/i sudah pernah melakukan klaim kepada pihak BPJS kesehatan ?
5. Dimanakah Bapak/Ibu/saudara/i dapat melakukan pengobatan dengan jasa BPJS Kesehatan ?
6. Bagaimana cara pembayaran iuran bulanan kepada pihak BPJS Kesehatan ?
7. Apakah Bapak/Ibu/saudara/i sebagai anggota BPJS Kesehatan sudah melakukan kewajibannya ?
8. Apakah Bapak/Ibu/saudara/i sebagai anggota BPJS Kesehatan, sudah mendapatkan haknya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Apakah Bapak/Ibu/saudara/i diberi jaminan lain bila tidak mendapatkan hak sebagai anggota BPJS Kesehatan ? Jika ada, dalam bentuk apa jaminan tersebut ?
10. Ketika Bapak/Ibu/saudara/i melakukan klaim pada BPJS Kesehatan, apakah klaim seluruhnya di tanggung oleh BPJS Kesehatan ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak C

© H

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan *Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan*
Pekanbaru dari *Perspektif Fiqh Muamalah*, yang ditulis oleh :

Nama : **Ainun Amelya**
NIM : 11522201406
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Oktober 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. H. Zainal Arifin, MA

Sekretaris
Basir, SHI, MH

Penguji I
H. Rahman Alwi, MA

Penguji II
Headri Sayuti M.Ag

Mengetahui
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum


Erni, S.Sos., MM
NIP. 19680226 199103 2 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email: admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : AINUN AMELYA

NIM : 11522201406

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Judul : PENGELOLAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
(BPJS) KESEHATAN PEKANBARU DARI PRESPEKTIF FIQH
MUAMALAH

Pembimbing : Drs. H. Zainal Arifin, MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 14 November 2019

An. Pimpinan Redaksi

M. Alfi Svahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O. Box 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web: <http://fasih.uin-suska.ac.id>, E-mail: fsihuinriau@gmail.com

Nomor : Un.04/F.1.1/PP.00.9/10052/2018
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : *Mohon Izin Melakukan PraRiset*

Pekanbaru, 20 Desember 2018

Kepada
Yth.
BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru
di
Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : AINUN AMELYA
NIM : 11522201406
Semester/Tahun : VII (Tujuh) / 2018
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin.

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198603 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fash.uin-suska.ac.id Email : fash@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4550/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 15 Mei 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AINUN AMELYA
NIM : 11522201406
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : BPJS Kesehatan cab. Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pekanbaru dari
Prespektif Fiqh Muamalah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/22847

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau**, Nomor : **Un.04/F.I/PP.00.9/4550/2019** Tanggal **15 Mei 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

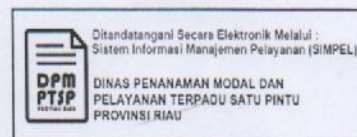
- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : AINUN AMELYA |
| 2. NIM / KTP | : 11522201406 |
| 3. Program Studi | : HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENGELOLAAN BADAN PENGELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN PEKANBARU DARI PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : BPJS KESEHATAN CABANG PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 16 Mei 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- ④ Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

SURAT KETERANGAN

Nomor : 3782/II-01/0919

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : AINUN AMELYA
NIM : 11522201406
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang : S1
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

telah selesai melaksanakan penelitian di BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru dalam rangka menyelesaikan Skripsi dengan judul : **"Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Pekanbaru Dari Perspektif Fiqh Muamalah"** sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian agar salinan hasil penelitian diserahkan dalam bentuk *hardcopy* paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak penelitian tersebut disahkan oleh instansi terkait.

Demikian disampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 09 September 2019



AA/dp/OH0203

Kantor Cabang Pekanbaru
Jl. Tuanku Tambusai Ujung Komp. 20 Ruko No. 6F - 10J
Kel. Labuhbaru Barat Kec. Payung Sekaki
Pekanbaru Riau 28292
Telp. +62 761 32004 Fax. +62 761 862880
www.bpjs-kesehatan.go.id

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Ainun Amelya , Lahir di Binanga, Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 27 Oktober 1996. Anak pertama dari 7 bersaudara dari pasangan Ayahandan Asrul Matondang dan Ibund Masrona Pulungan.

1. SD Negeri 200117 Panyanggar lulus tahun 2009
2. MTS Negeri Panyabungan lulus tahun 2012
3. MA Negeri Panyabungan lulus tahun 20015

Setelah dinyatakan lulus dari MA Negeri Panyabungan penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2015 di Fakultas Syyariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

*Berka doa dan motivasi dari keluarga serta teman-teman seperjuangan yang selalu membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis berhasil dalam menyelesaikan skripsi yyang berjudul **“Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pekanbaru dari Perpektif Fiqh Muamalah”** lulus setelah dimunaqasyahkan dengan predikat lulus sangat memuaskan pada tanggal 21 Oktober 2019 dan berhak mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H)*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.